

*Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI*  
**BUDGET ISSUE BRIEF**  
**Politik & Keamanan**  
*Vol 01, Ed 17, September 2021*

**Kondisi Keamanan Siber Indonesia Hal. 1**

**Tinjauan Realisasi Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia Hal. 3**

**Peningkatan Keamanan Nasional dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Hal. 5**



## **Daftar Isi**

<b>Kondisi Keamanan Siber Indonesia.....</b>	<b>1</b>
<b>Tinjauan Realisasi Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia .....</b>	<b>3</b>
<b>Peningkatan Keamanan Nasional dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) .....</b>	<b>5</b>

## **Dewan Redaksi**

### **Penanggung Jawab**

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

### **Pemimpin Redaksi**

Rendy Alvaro

### **Redaktur**

Ratna Christianingrum \* Ade Nurul Aida

Tio Riyono \* Riza Aditya Syafri

### **Editor**

Satrio Arga Effendi

### **Sekretariat**

Husnul Latifah \* Musbiyatun

Memed Sobari \* Hilda Piska Randini

*Budget Issue Brief* Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

## Komisi I

## POLITIK DAN KEAMANAN

## Kondisi Keamanan Siber Indonesia

## HIGHLIGHT

- Dalam melindungi dan meminimalisir ruang siber dari ancaman siber, maka diperlukan keamanan siber agar ruang siber dapat tetap berjalan.
- Data GCI 2020 menunjukkan posisi keamanan siber Indonesia berada pada peringkat 24 jauh berada dibawah Singapura maupun Malaysia yang berada pada posisi 4 dan 5.
- Berdasarkan data A.T. Kearney (2018) sektor khusus keamanan siber Indonesia masih sangat kurang bahkan masih belum hadir.
- Laporan NCSI menyebutkan regulasi perundang-undangan di Indonesia masih lemah.
- Dukungan belanja keamanan siber Indonesia masih relatif kecil. Berdasarkan data A.T. Kearney (2018) menunjukkan, bahwa pada tahun 2017 anggaran belanja keamanan siber Indonesia hanya mencapai USD1.829 juta atau setara dengan 0,02 persen dari GDP.

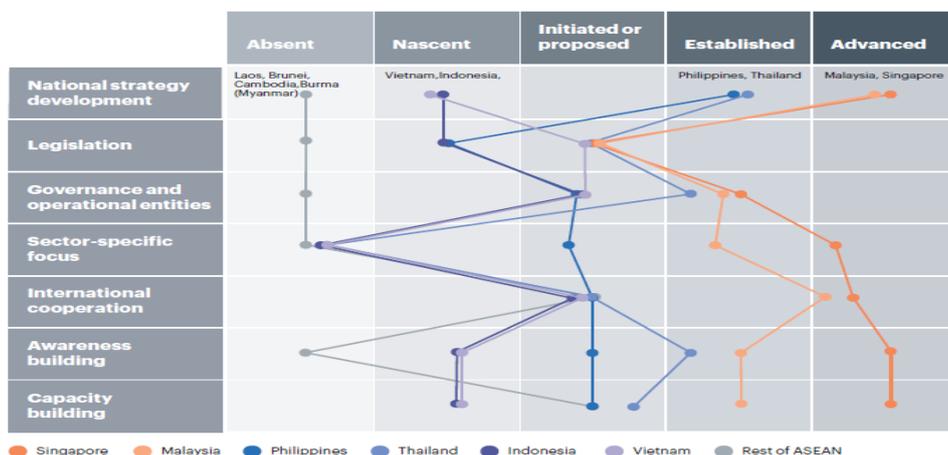
Seiring dengan pesatnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, ancaman siber pun juga turut mengalami peningkatan. Berdasarkan laporan data anomali trafik BSSN (2021), sepanjang tahun 2020, serangan siber yang dialami Indonesia mencapai angka 495,3 juta atau meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya 2019 yang sebesar 290,3 juta. Dalam melindungi dan meminimalisir ruang siber dari ancaman siber, maka diperlukan keamanan siber agar ruang siber dapat tetap berjalan. Keamanan siber terdiri dari praktik, tindakan, dan upaya untuk melindungi ekosistem siber dan aset-aset perusahaan dan pengguna dari serangan berbahaya yang bertujuan untuk mengganggu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi atau data (Fischer, 2005; ITU, 2012).

## Kondisi Keamanan Siber

Data Global Cybersecurity Index (GCI) 2020 yang didasarkan atas konsep lima kategori penilaian atau dinamakan *The Five Pillars of GCI Framework* yaitu *legal, technical and procedure, organizational, capacity building*, dan *international cooperation*, menunjukkan bahwa posisi keamanan siber Indonesia berada pada peringkat 24 dengan skor 94,88, jauh berada dibawah negara Singapura maupun Malaysia yang berada pada posisi 4 (98,52) dan 5 (98,06).

Berdasarkan data A.T. Kearney (2018) sektor khusus keamanan siber di Indonesia masih sangat kurang bahkan masih belum hadir. Sementara baik dari sisi strategi nasional, peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, maupun legislasi atau aturan perundang-undangan di Indonesia baru mulai terbentuk.

Gambar 1. Posisi Keamanan Siber di Negara ASEAN



Sumber: A.T. Kearney, 2018

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

## Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

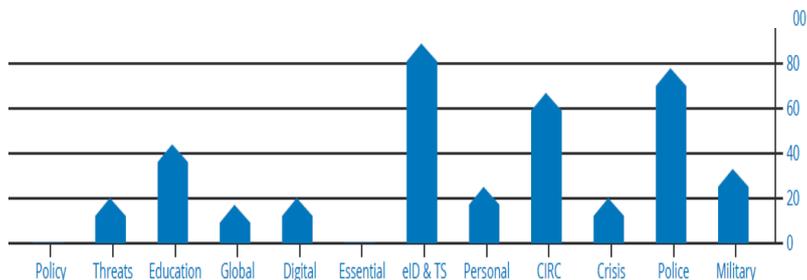
Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ade Nurul Aida

### Lemahnya Regulasi Terkait Keamanan Siber

Berdasarkan laporan *National Cyber Security Index* (2021), Indonesia berada pada urutan ke-5 dari 10 negara ASEAN dengan skor indeks 38,96 dan berada di urutan 77 dari 160 negara yang masuk dalam analisa NCSI tahun 2020. Dari hasil laporan tersebut menyebutkan bahwa regulasi atau aturan

**Gambar 2.** Persentase Pemenuhan Penilaian Analisa NCSI



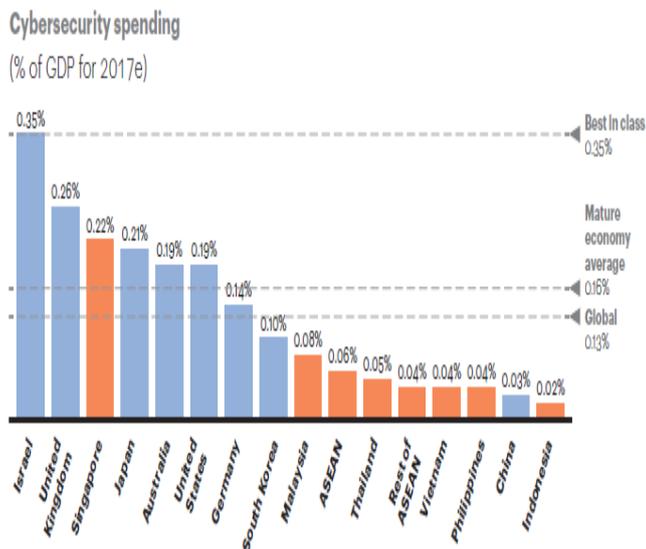
Sumber: National Cybersecurity Index, 2021

perundang-undangan di Indonesia masih lemah disamping perlindungan layanan yang esensial dalam keamanan siber. Hal ini juga ditandai dengan dasar hukum yang mengatur keamanan siber di Indonesia hanya termuat dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi pun masih dalam proses pembahasan oleh DPR, sementara RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber juga belum ada pembahasan lebih lanjut. UU ITE sendiri memberikan perlindungan hukum untuk konten sistem elektronik dan transaksi elektronik. Akan tetapi, UU ini tidak mencakup aspek penting keamanan siber, seperti infrastruktur informasi dan jaringan, serta sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keamanan siber (CIPS, 2019).

### Dukungan Anggaran yang Masih Terbatas

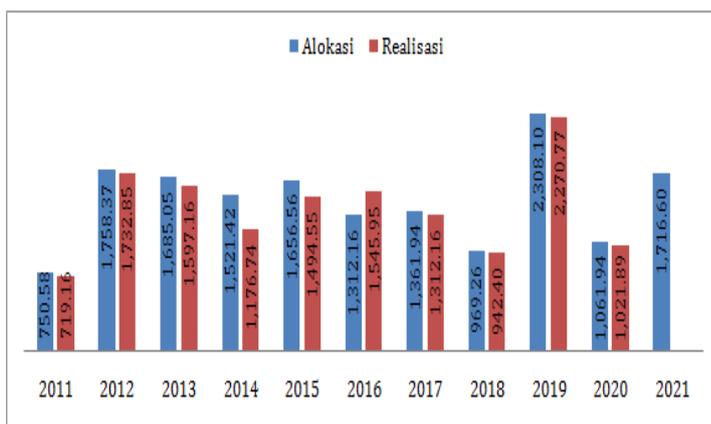
Dalam segi anggaran, dimana maju dan canggihnya keamanan siber berkorelasi dengan belanja keamanan siber yang dikeluarkan (Qamar, 2020), menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2021 anggaran pada lembaga BSSN, dimana merupakan lembaga yang memiliki tugas utama dalam bidang keamanan siber cenderung mengalami fluktuatif, dimana pada tahun 2019 merupakan kenaikan anggaran tertinggi sepanjang tahun tersebut.

**Gambar 4.** Rasio Belanja Keamanan Siber terhadap GDP (Persen)



Sumber: A.T. Kearney, 2018

**Gambar 3.** Anggaran Belanja BSSN 2011-2021 (Rp miliar)



Sumber: LKPP berbagai Tahun, Nota Keuangan APBN 2021

Namun sayangnya dukungan belanja keamanan siber di Indonesia sendiri masih relatif kecil. Berdasarkan data A.T Kearney (2018) menunjukkan, bahwa pada tahun 2017 anggaran belanja keamanan siber Indonesia hanya mencapai USD1.829 juta atau setara dengan 0,02 persen dari GDP. Besaran angka tersebut masih jauh diantara beberapa negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, bahkan rata-rata negara ASEAN maupun rata-rata global. Hal ini menunjukkan bahwa dukungan anggaran keamanan siber oleh pemerintah masih sangat terbatas. Untuk itu diperlukan peningkatan dukungan anggaran serta percepatan pengaturan regulasi sehubungan dengan keamanan siber.

## Komisi II

## POLITIK DAN KEAMANAN

## Tinjauan Realisasi Anggaran Arsip Nasional Republik Indonesia

## HIGHLIGHT

- ANRI sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional
- Realisasi Pendapatan ANRI tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar -1,01 persen
- Realisasi Belanja pegawai ANRI pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar -14,77% atau Rp7,79 miliar
- Realisasi Belanja barang ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -46,19% atau sebesar Rp49,85 miliar.
- Realisasi Belanja modal ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar -95,23% atau sebesar Rp96,52 miliar.

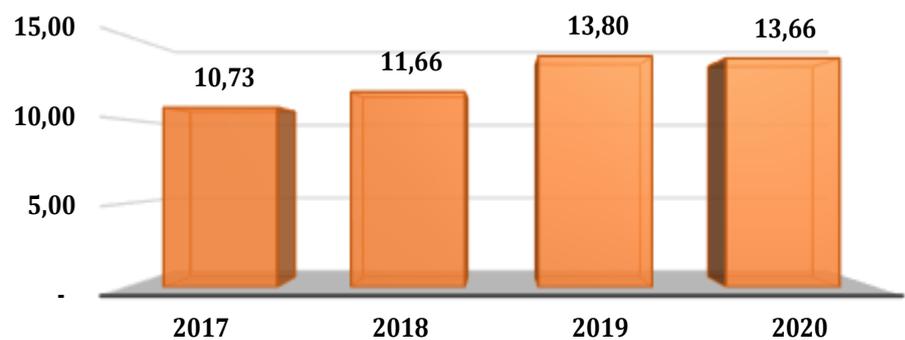
Lembaga Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki peran dalam penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai regulator yang mempunyai tugas merumuskan dan menetapkan norma, standar, pedoman dan kriteria penyelenggaraan kearsipan secara nasional yang akan menjadi acuan dalam perumusan dan penetapan peraturan dan kebijakan kearsipan di lembaga kearsipan di tingkat daerah maupun di kementerian/lembaga.

ANRI sebagai suatu lembaga pemerintah harus adaptif dalam perkembangan teknologi dan dituntut pula mampu mentransformasikan sistem kearsipan yang masih manual ke sistem digital dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Namun ada beberapa tantangan yang dihadapi kearsipan Indonesia di era revolusi industri 4.0 yaitu terkait preservasi digital, pengolahan arsip digital dan penggunaan artificial intelligence di dunia kearsipan. (Media Kearsipan Nasional, 2019).

## a. Realisasi pendapatan ANRI

Realisasi pendapatan ANRI (Gambar 1) mengalami peningkatan dari tahun 2017 sebesar Rp10,73 milyar menjadi Rp13,66 milyar pada tahun 2020. Realisasi Pendapatan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan terdapat penurunan sebesar -1,01 persen. Hal ini disebabkan penurunan estimasi pendapatan dan juga adanya pandemi Covid-19 yang ditindaklanjuti adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah kerja ANRI. PSBB ini berdampak pada menurunnya pengguna jasa layanan arsip dan persewaan gedung Gajah Mada ANRI.

Gambar 1. Perkembangan Realisasi Pendapatan ANRI (dalam miliar rupiah)



sumber: Laporan Keuangan ANRI, diolah

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

## Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

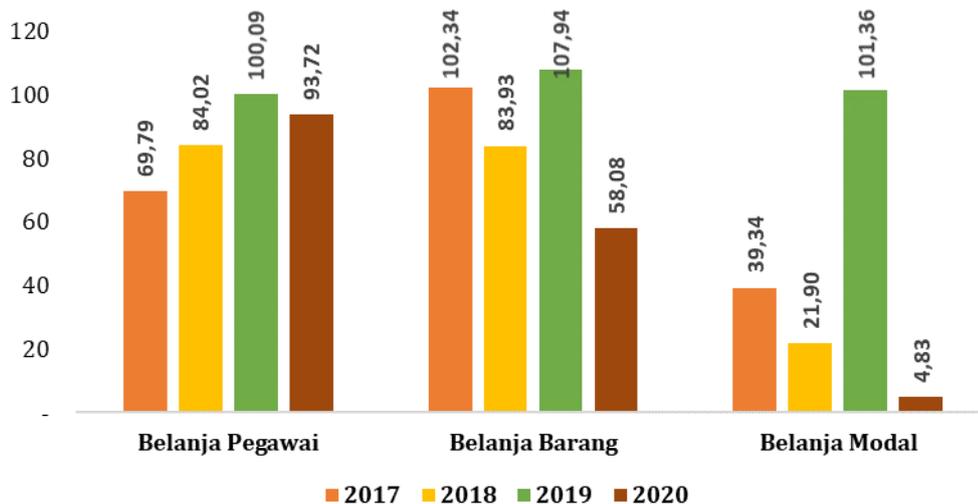
Penulis: · Rendy Alvaro · Nova Aulia Bella

Pendapatan yang dikelola ANRI berupa penerimaan yang meliputi Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN; Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi; Pendapatan Jasa Lainnya; Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan; Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-Lain.

## b. Realisasi belanja ANRI

Realisasi belanja pegawai ANRI pada tahun 2017 sebesar Rp69,79 miliar yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar Rp93,72 miliar (Gambar 2). Realisasi Belanja pegawai ANRI pada tahun 2020 bila dibandingkan dengan tahun 2019 secara keseluruhan mengalami penurunan sebesar -14,77% atau Rp7,79 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh tidak dibayarkannya tunjangan ke-13 di bulan Juni dan tunjangan hari raya untuk pejabat struktural eselon I, II dan fungsional madya.

**Gambar 2.** Perkembangan Realisasi Belanja ANRI  
(dalam miliar rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan ANRI, diolah.

Untuk realisasi belanja barang ANRI dari tahun 2017 yang sebesar Rp102,34 miliar mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 yang menjadi sebesar Rp58,08 miliar. Realisasi Belanja barang ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -46,19% atau sebesar Rp49,85 miliar. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan anggaran belanja barang yang dialihkan untuk penanganan dampak pandemi Covid-19 dan proses penyerapan anggaran belanja barang yang menjadi terkendala akibat pandemi Covid-19 terutama belanja barang non operasional, belanja jasa dan belanja perjalanan dinas baik dalam negeri maupun luar negeri.

Realisasi belanja modal ANRI juga mengalami penurunan yang pada tahun 2017 sebesar Rp39,34 miliar menjadi sebesar 4,83 miliar. Realisasi belanja modal ANRI pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 juga mengalami penurunan yang cukup besar yaitu -95,23%, atau sebesar Rp96,52 miliar. Hal ini disebabkan oleh pengurangan anggaran Belanja Modal di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 termasuk belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan dan belanja modal lainnya.

## Komisi III

## POLITIK DAN KEAMANAN

# Peningkatan Keamanan Nasional dalam Rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

## HIGHLIGHT

- Dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan tingginya angka kemiskinan secara nasional.
- Program Pemulihan Ekonomi Nasional bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi Covid-19.
- Keberhasilan program PEN bergantung pada kondisi ketertiban dan keamanan.
- Realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun.
- Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan adalah Kepolisian.
- Kinerja Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan menunjukkan hasil yang menggembirakan berkaca dari dua indeks: GPI dan STI.
- Berdasarkan penjelasan tersebut, skor GPI dan STI Indonesia masih menunjukkan posisi dalam jajaran negara damai di dunia pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19.

Sebagaimana diketahui bahwa dampak pandemi Covid-19 mendorong munculnya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang secara tidak langsung mempengaruhi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dampaknya, angka kemiskinan meningkat signifikan setelah sebelumnya menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan. Sebagai respons, pemerintah membuat kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Diharapkan kebijakan tersebut dapat mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam rangka mendukung program PEN diperlukan kondisi ketertiban dan keamanan yang baik. Heru Kusmanto dalam Jurnal Kajian Lemhannas RI edisi 25 tahun 2016 mengungkapkan bahwa kondisi ketertiban dan keamanan yang stabil memberikan dukungan kepada pemerintah untuk fokus melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun sebaliknya situasi ketertiban dan keamanan yang tidak stabil akan membuat pemerintah tidak fokus melaksanakan pembangunan. Pemerintah perlu melakukan antisipasi lebih dini untuk mengidentifikasi sekaligus memitigasi permasalahan yang mungkin timbul sehingga fokus pemerintah juga menjaga kondisi nasional yang kondusif.

Dalam kurun waktu tahun anggaran 2017-2020, realisasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan tumbuh rata-rata sebesar 4,3 persen per tahun, yaitu dari Rp135.748,1 miliar (2017) menjadi Rp154.107,6 miliar (2020).

Gambar 1. Perkembangan Belanja Fungsi Ketertiban dan Keamanan (triliun rupiah)



\* Outlook 2021

\*\* Rancangan APBN 2022

Sumber: Nota Keuangan

## PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

### Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

**Redaktur:** Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

**Penulis:** Ratna Christianingrum · Azizah Ulfa · Tio Riyono

Alokasi anggaran fungsi ketertiban dan keamanan dalam tahun 2021 digunakan dalam rangka memperkuat stabilitas politik, hukum, dan keamanan dalam mendorong PEN antara lain: 1) modernisasi alat material khusus (almatsus); 2) pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat; 3) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi; 4) peningkatan sistem penanganan perkara pidana terpadu berbasis teknologi informasi (SPPT-TI); 5) profesionalisme dan kesejahteraan SDM; dan 6) penanganan dampak pandemi Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional, seperti kegiatan pendisiplinan pelaksanaan protokol kesehatan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi.

### Peran Kepolisian

Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi ketertiban dan keamanan adalah Kepolisian. Dalam konteks tersebut, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020. Dalam Inpres tersebut memuat empat poin yang diarahkan khusus kepada Kepolisian agar terciptanya ketertiban masyarakat, antara lain:

1. Kepolisian turut mendukung dengan mengawasi penerapan protokol kesehatan
2. Kepolisian bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan patroli.
3. Kepolisian diarahkan untuk melakukan pembinaan kepada masyarakat dengan tujuan supaya masyarakat ikut berpartisipasi dalam mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.
4. efektivitas penegakkan hukum terkait pelanggaran protokol kesehatan.

Kinerja Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang menjalankan fungsi ketertiban dan keamanan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut dapat tercermin dari dua indeks: *Global Peace Index* (GPI) dan *Security Threats Index* (STI). GPI

mempertimbangkan: 1) konflik yang sedang terjadi baik domestik maupun internasional; 2) keselamatan dan keamanan masyarakat; 3) militerisasi. Sedangkan STI mempertimbangkan ancaman keamanan terhadap suatu negara, seperti pemboman, serangan dan kematian terkait pertempuran, gerakan pemberontak, pemberontakan, kudeta, atau terorisme serta faktor kriminal yang serius, seperti kejahatan terorganisir dan pembunuhan, dan kepercayaan yang dirasakan warga terhadap keamanan domestik.

Gambar 2. Perkembangan Indikator Ketertiban dan Keamanan



Sumber: *Fund for Peace* dan *The Institute for Economics and Peace*

Menurut data GPI dan STI, kondisi ketertiban dan keamanan Indonesia membaik di tahun 2021. Pada tahun 2020, GPI Indonesia menempati peringkat 44 dari 163 negara dengan skor 1,786. Kemudian pada tahun 2021, GPI Indonesia menempati posisi 42 dari 163 negara dengan skor 1,783 sehingga mampu menempatkan Indonesia pada posisi ketiga di Asia Tenggara, di bawah Singapura dan Malaysia. Skor STI pada 2021 juga menunjukkan perbaikan dari 6,1 (2020) menjadi 5,8 (2021). Meskipun Indonesia masih ada persoalan terkait dengan keamanan, namun masih jauh lebih baik dari banyak negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, skor GPI dan STI Indonesia masih menunjukkan posisi dalam jajaran negara damai di dunia pada tahun 2021 di tengah kondisi pandemi Covid-19.